ASET – BMD

2023

PERBUP BOGOR NO.5 , BD 2023/NO.5, 14 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI NO. 19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perencanaan kebutuhan BMD meliputi: perencanaan pengadaan; perencanaan pemeliharaan; perencanaan pemanfaatan; perencanaan pemindahtanganan; perencanaan penghapusan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan kebutuhan, Bupati dapat membentuk tim penyusunan dan penelaahan perencanaan kebutuhan BMD. Tim penyusunan dan penelaahan perencanaan kebutuhan bertugas menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD sebagai dasar penelaahan dokumen perencanaan kebutuhan BMD. Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan RKBMD, paling sedikit mempertimbangkan: kesesuaian dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang; hasil penelaahan atas RKBMD pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan. Penelaahan atas RKBMD dilakukan terhadap: a. relevansi program dengan rencana keluaran pengguna barang; b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang; dan c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023.
- Lampiran: 96 hlm.